

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pembangunan daerah, sebab daerah Indonesia terdiri atas provinsi-provinsi, kabupaten ataupun kota dan daerah-daerah yang lebih kecil. Kegiatan pembangunan yang direncanakan serta dilakukan harus sanggup menyentuh dan dirasakan hingga penduduk kecil. Pembangunan mempunyai definisi yang luas ialah sesuatu proses multi dimensi yang mencakup terdapatnya perubahan-perubahan yang berguna di dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi, struktur sosial, kesenjangan, pengangguran serta pengendalian kemiskinan (Todaro & Smith, 2003) dalam jurnal (Rahayu, 2019).

Faktor tenaga kerja ialah bagian yang tidak terpisahkan dalam suatu proses pembangunan. Tenaga kerja ialah salah satu faktor produksi yang sangat berarti guna mendongkrak perekonomian sesuatu wilayah. Tanpa adanya tenaga kerja, faktor produksi alam serta faktor produksi modal tidak bisa digunakan secara maksimal. Tenaga kerja didefinisikan selaku penduduk yang berada dalam usia kerja. Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan jadi dua kelompok, yakni tenaga kerja serta bukan tenaga kerja. Penduduk yang termasuk tenaga kerja yaitu bila penduduk tersebut sudah memasuki usia kerja. Batasan usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berusia 15-64 tahun. Tenaga kerja ini dibagi atas kelompok angkatan kerja serta bukan angkatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimaksud tenaga kerja adalah

setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Kemenperin, 2003).

Provinsi yang ada di Jawa ada enam, di antaranya; DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk yang dominan di Indonesia mencapai 48,78 juta jiwa pada tahun 2021. Jumlah penduduk tersebut juga disertai dengan meningkatnya penduduk usia produktif (15-65 tahun). Dengan memiliki jumlah penduduk paling dominan tentu banyak tantangan serta rintangan yang dialami oleh Provinsi Jawa Barat. Di antaranya yaitu adanya masalah ketenagakerjaan ialah penyediaan lapangan pekerjaan. Berikut tabel 1.1 yang menunjukkan tenaga kerja yang terserap menurut Provinsi di Jawa tahun 2019-2021.

Tabel 1. 1 Tenaga Kerja yang Terserap Menurut Provinsi di Jawa Tahun 2019-2021 (Orang)

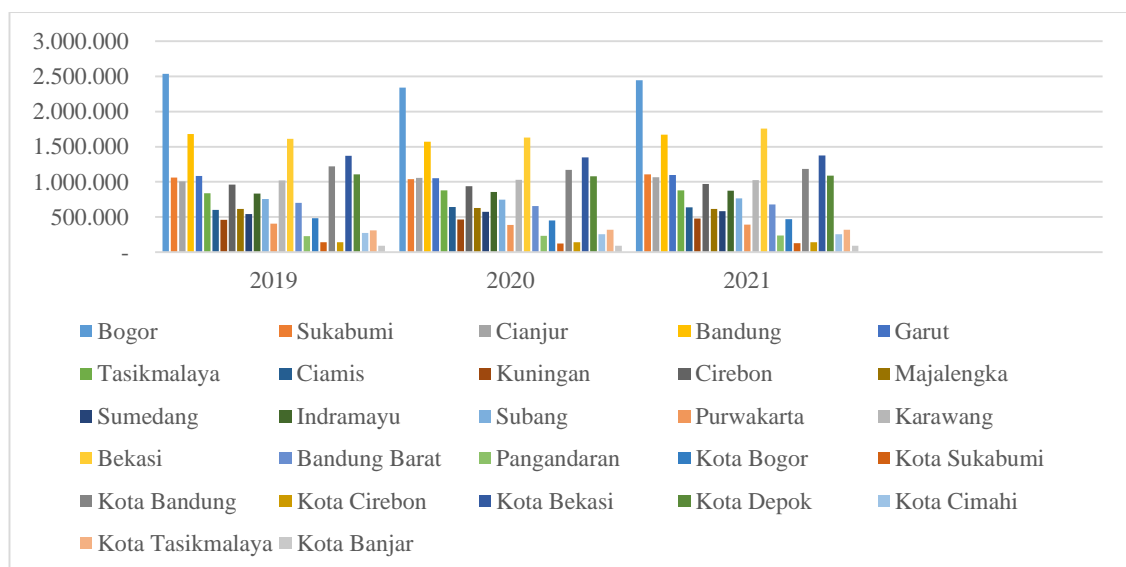
Provinsi	2019	2020	2021
Jawa Barat	6,18%	-1,76%	2,95%
Jawa Timur	0,96%	-0,33%	6,47%
Jawa Tengah	1,09%	-0,37%	1,70%
Banten	3,76%	-0,01%	2,63%
DKI Jakarta	2,33%	-3,67%	1,68%
DI Yogyakarta	2,81%	-0,40%	3,55%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2022 (diolah kembali)

Berdasarkan tabel 1.1 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa Penyerapan Tenaga Kerja (PTK) di setiap provinsi mengalami penurunan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 PTK di Jawa Barat sebesar 2,95%, sedangkan pada tahun 2020 PTK di Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 1,76%. Jawa Timur pada tahun 2021, PTK mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar 6,47%, sedangkan Jawa Barat di

tahun yang sama tenaga kerja yang terserapnya hanya sebesar 2,95%. Hal ini menjadi fenomena karena Jawa Barat memiliki jumlah angkatan kerja tertinggi di antara provinsi lainnya, tetapi tenaga kerja yang terserap rendah dibandingkan Provinsi Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Maka dari itu, peneliti ingin menganalisis penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat.

Pada tahun 2017-2021 penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Hal tersebut berkaitan dengan terditeksinya kasus positif Covid-19 di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020, sehingga Jawa Barat menggambarkan provinsi dengan tenaga kerja yang terkena imbas Covid-19 paling banyak karena selama pandemi banyak perusahaan yang melakukan WFH (*work from home*) bahkan melakukan PHK (pemutusan hubungan kerja) kepada pekerjanya.

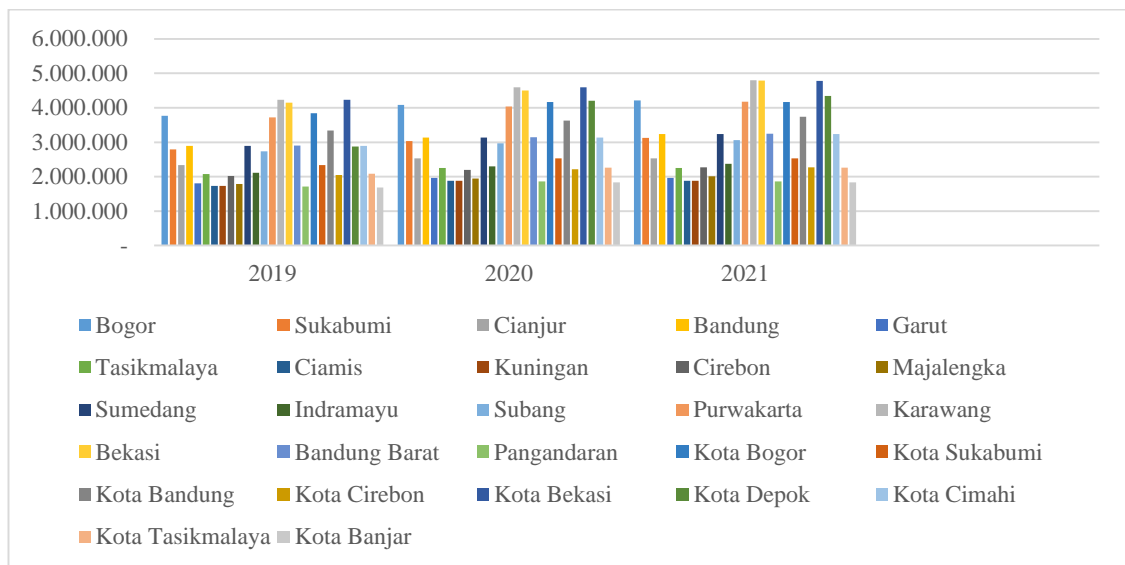


Gambar 1. 1 PTK pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Orang)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.1 PTK pada kabupaten/kota di Jawa Barat mengalami fluktuasi. Dari kurun waktu 2019-2021 PTK tertinggi berada di Kabupaten Bogor dan terendah berada di Kota Banjar. Pada tahun 2020 PTK di Kabupaten Bogor sebesar 2.342.939 orang, angka ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 7,73% akibat pandemi sedangkan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 2.445.768 orang. Pada tahun 2020 PTK di Kota Banjar sebesar 91.602 orang dan pada tahun 2021 sebesar 88.631 orang. Angka ini mengalami penurunan sebesar 3,24% dari tahun sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan PDRB di Kota Banjar pada tahun 2021 menurun, makanya tenaga yang terserap juga menurun.

Upah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga kerja (Ferdinandus, 2014) karena orang bekerja tujuannya untuk mendapatkan upah guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Apabila upah yang diberikan oleh perusahaan dinilai besar ataupun sudah cocok dengan jasa ataupun pengorbanan yang diberikan, maka para pencari kerja akan berupaya keras agar bisa bekerja di perusahaan tersebut. Pemberian upah yang adil serta setimpal bisa memicu motivasi kerja yang besar, sehingga kinerja para buruh/pekerja jadi lebih baik, serta tentunya berpengaruh terhadap pemasukan perusahaan.



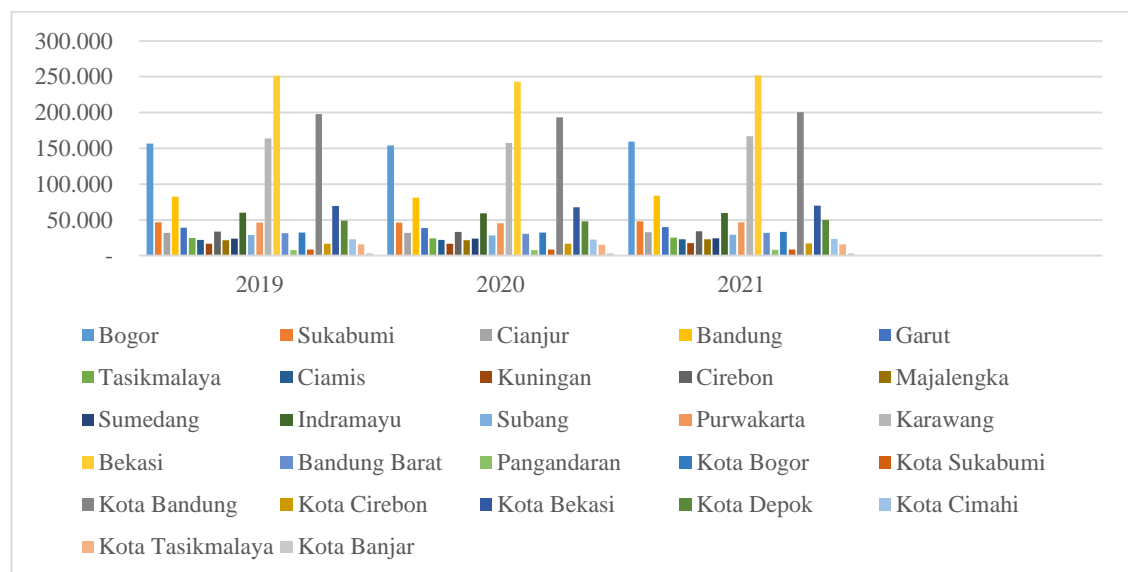
Gambar 1. 2 Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Rupiah)

Sumber: Open Data Jabar 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.2 dalam kurun waktu lima tahun (2019-2021) menunjukkan bahwa UMK tertinggi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat berada di Kabupaten Karawang sebesar Rp4.798.312 pada tahun 2021. Angka ini naik sebesar 4,44% dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan Kabupaten Karawang memiliki letak yang strategis dan juga dekat dengan Bekasi dan Purwakarta yang memiliki kawasan industri juga. UMK terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp1.831.885 pada tahun 2020-2021.

Hal lain pula yang mendapat perhatian dari pemerintah sebagai upaya menanggulangi permasalahan ketenagakerjaan ialah produk domestik regional bruto (PDRB). Faktor PDRB ialah nilai tambah atas barang serta jasa yang dihasilkan oleh bermacam unit produksi atau sektor di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB bisa mempengaruhi jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan anggapan apabila nilai PDRB bertambah, maka jumlah nilai tambah output

ataupun penjualan dalam seluruh unit ekonomi disuatu daerah akan bertambah. Semakin besar hasil ataupun penjualan yang dicoba perusahaan maka akan mendorong perusahaan guna menambah permintaan tenaga kerja agar produksinya bisa ditingkatkan guna mengejar peningkatan penjualan yang terjadi (Feriyanto, 2014).

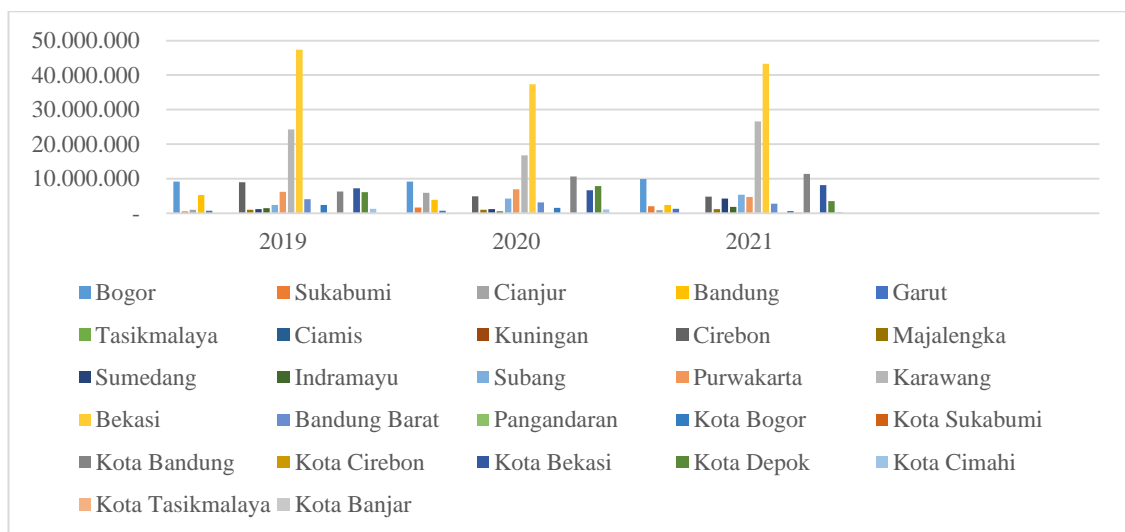


Gambar 1. 3 PDRB pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.3 dalam rentang waktu 2019-2021 PDRB di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi. PDRB tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar Rp251.829.000.000 pada tahun 2021, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan 3,40% dari tahun sebelumnya akibat pandemi. PDRB terendah berada di Kota Banjar sebesar Rp3.364.000.000. Diharapkan setiap tahunnya PDRB naik. Jika PDRB naik, penyerapan tenaga kerja akan mengalami peningkatan.

Selain PDRB faktor investasi secara langsung dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Hal ini didasarkan atas Teori Keynes bahwa investasi dengan penyerapan tenaga kerja mempunyai hubungan yang positif yaitu apabila investasi semakin tinggi, maka penyerapan tenaga kerja semakin tinggi pula. Dengan investasi semakin bertambah, diharapkan juga penyerapan tenaga kerja akan bertambah yang diketahui setiap tahunnya tenaga kerja semakin meningkat.

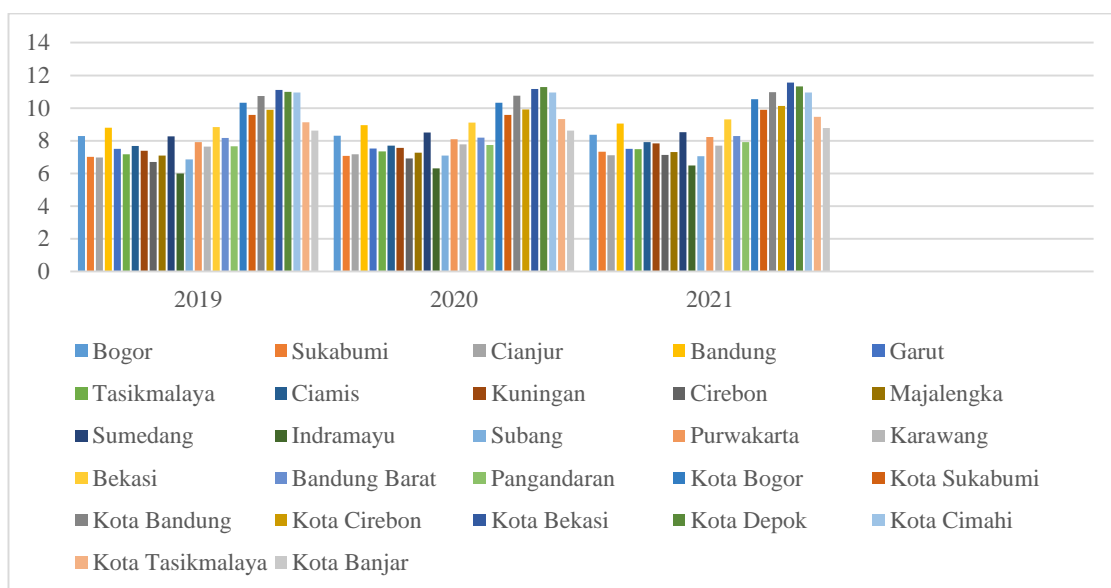


Gambar 1. 4 Investasi pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Juta Rupiah)

Sumber: Open Data Jabar 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan pada gambar 1.4 terlihat bahwa investasi pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dalam waktu lima tahun (2019-2021) mengalami fluktuasi. Investasi tertinggi berada di Kabupaten Bekasi sebesar Rp43.263.319.000.000 pada tahun 2021. Hal ini dikarenakan jumlah proyek yang terealisasi meningkat, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan cukup besar yaitu 21,19% dari tahun sebelumnya akibat Covid-19. Investasi terendah pada tahun 2021 berada di Kota Banjar sebesar Rp1.086.000.000.

Penyerapan tenaga kerja bagi perusahaan, biasanya didasarkan pada kualitas tenaga kerja, yang bisa dilihat dari tingkat pendidikan yang dikuasainya. Pendidikan yang dikuasai akan mempengaruhi produktivitas kerja, sebab pendidikan merupakan modal untuk menciptakan produktivitas yang tinggi di dalam suatu pekerjaan. Penerapan pembelajaran dasar sembilan tahun ialah salah satu metode yang dicoba Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna memenuhi tuntutan dunia kerja. Seseorang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, hendaknya mempunyai pekerjaan serta upah yang lebih baik di bandingkan seseorang dengan pendidikan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penduduk yang mempunyai tingkatan pembelajaran yang lebih tinggi biasanya akan lebih gampang berbaaur dalam area pekerjaan (Hidayatulloh, 2017).



Gambar 1. 5 Rata-Rata Lama Sekolah Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2021 (Tahun)

Sumber: Open Data Jabar 2023 (diolah kembali)

Berdasarkan gambar 1.5 terlihat bahwa RLS di kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat baik laki-laki maupun perempuan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2019-2021 RLS tertinggi berada di Kota Bekasi sebesar 11,55 tahun. Angka ini naik sebesar 3,49% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena meningkatnya infrastruktur pendidikan yang juga meningkat dan RLS terendah berada di Kabupaten Indramayu sebesar 6,49 tahun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 3,02% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Provinsi Jawa Barat ingin memenuhi tuntutan dunia kerja dengan salah satu metode penerapan pembelajaran dasar sembilan tahun.

Jumlah tenaga kerja yang terserap di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2021 tidak stabil dan terlihat dari jumlah pertumbuhannya dapat disebabkan oleh berbagai pengaruh seperti upah yang setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2021 jumlahnya sama seperti tahun 2020, PDRB yang mengalami fluktuasi karena tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, investasi yang perkembangannya mengalami fluktuasi pada tahun 2020 akibat Covid-19, dan rata-rata lama sekolah yang perkembangan baik dan selalu meningkat setiap tahunnya menjadi alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini yaitu: 1) penggabungan beberapa variabel ke dalam model, dan 2) menjadi penelitian yang mengangkat topik penyerapan tenaga kerja dengan variabel bebas upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah dengan tahun terkini di Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan uraian tersebut, dengan ini peneliti akan melakukan penelitian

yang berjudul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat Tahun 2017-2021**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, perlu adanya identifikasi masalah penelitian agar penelitian yang dilaksanakan memiliki ruang lingkup yang jelas. Dengan demikian dapat disusun permasalahan mengenai penyerapan tenaga kerja yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
2. Bagaimana pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?
3. Bagaimana elastisitas (kepekaan) penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 secara parsial,

2. untuk mengetahui pengaruh upah minimum kabupaten/kota, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021 secara bersama-sama, dan
3. untuk mengetahui elastisitas (kepekaan) penyerapan tenaga kerja terhadap upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2017-2021.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Diharapkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Hasil studi ini diharapkan bisa memperluas serta memperkaya pengetahuan bagi pembaca di bidang ekonomi, dan bisa meningkatkan pengetahuan serta menambah pemahaman yang baik khususnya di bidang ekonomi publik mengenai pengaruh upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja yang bisa digunakan sebagai bahan rujukan serta sumber data untuk melaksanakan riset berikutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai upah minimum kabupaten/kota, PDRB, investasi, dan rata-rata lama sekolah terhadap penyerapan tenaga kerja.

